



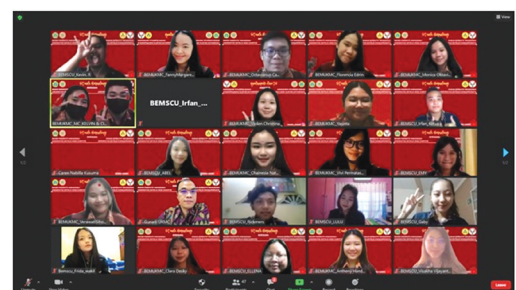
Kombes Pol Supriadi  
Kabid Humas Polda Sumsel

## Ditreskrim Surati BI dan PPAK

### Untuk Buka Rekening Anak Bungsu Akidi Tio

PALEMBANG, MEDIASRIWIJAYA- Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda Sumsel terus mendalami kasus hibah Rp 2 triliun dari keluarga mending Akidi Tio dengan melayangkan surat ke Bank Indonesia selaku Otoritas dan ke PPAK, guna mengetahui dana pada rekening Heryanti anak bungsu almarhum Akidi Tio apakah sesuai yang tertera pada Bilyet Giro (BG) atau tidak.

● Bersambung ke halaman 11



Kegiatan studi banding ini BEM UKMC mengajak Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Katolik Soegijapranata (SCU) untuk bergabung melalui virtual zoom meeting.

## STUDI BANDING BEM UKMC DAN BEM SOEGIJAPRANATA

PALEMBANG, MEDIASRIWIJAYA - Tidak menyurutkan dengan aneka kegiatan bagi Unika Musi Charitas Palembang di masa pademi Covid-19 saat ini. Kali ini Badan Eksekutif Mahasiswa ( BEM ) Universitas Katolik Musi Charitas ( UKMC ) bersama Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Jawa Tengah melakukan kegiatan Studi banding secara virtual.

● Bersambung ke halaman 11

# 316.554 Pelamar Lulus Seleksi Administrasi CPNS KEMENKUMHAM



JAKARTA, MEDIASRIWIJAYA - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) secara resmi telah mengumumkan daftar nama para pelamar yang lulus tahapan seleksi administrasi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran 2021.

Kementerian yang dipimpin Yasona Laoly ini adalah kementerian yang paling banyak diminati dengan total 627.113 orang. Tidak semua pelamar upload dokumen persyaratan dan tidak semua yang upload dinyatakan memenuhi persyaratan.

Dari total jumlah pelamar itu, hanya 316.554 orang yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) dan dapat melaju ke tahap selanjutnya. Sisanya dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) atau tidak upload dokumen. Kepala Biro Kepegawaian Kemenkumham, Sutrisno men-

gatakan total yang lulus administrasi, untuk pelamar kualifikasi pendidikan non-SLTA sebanyak 35.878 orang, dan pelamar untuk kualifikasi pendidikan SLTA sejumlah 280.676 orang.

● Bersambung ke halaman 11



Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru (HD) menerima audiensi Ketua Dewan Pertimbangan Pendidikan Sumsel, Supadmi Kohar beserta anggota lainnya periode 2021-2025 dalam rangka silaturahmi di ruang tamu Gubernur Sumsel, Rabu (4/8).



## HD Bantu Dewan Pertimbangan Pendidikan Sumsel

PALEMBANG, MEDIASRIWIJAYA- Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru (HD) menerima audiensi Ketua Dewan Pertimbangan Pendidikan Sumsel, Supadmi Kohar beserta anggota lainnya periode 2021-2025 dalam rangka silaturahmi di ruang tamu Gubernur Sumsel, Rabu (4/8). Pada

kesempatan tersebut HD menyampaikan bahwa kehadiran Dewan Pertimbangan Pendidikan sangat diharapkan oleh banyak pihak, terutama didunia pendidikan apalagi dimasa pandemi seperti sekarang ini. "Kehadiran dewan sangat diharapkan oleh semua orang agar untuk lebih inspiratif yang dapat memberikan se-

buah inovasi didalam dunia pendidikan yang menjadikan dunia pendidikan di Sumsel jauh lebih baik lagi yang lebih menonjol dan memberikan corak baru terhadap dunia pendidikan. Apalagi disaat seperti ini," ungkap HD.

● Bersambung ke halaman 11

**CALL CENTER RUMAH SEHAT COVID-19**  
**WISMA ATLET JAKABARING SPORT CITY**

0822-6985-1948  
 0823-7275-5097

AYO VAKSINASI COVID-19

PATUHI PROTOKOL KESEHATAN COVID-19

MEMAKAI MASKER  
 MENJAUHI KERUMUNAN  
 MENJAGA JARAK  
 MEMBATASI MOBILISASI DAN INTERAKSI

H. HERMAN DERU  
 GUBERNUR SUMATERA SELATAN

**Payo Besamo Kito Patuhi  
 Protokol Kesehatan 5M**

untuk Memutus Mata Rantai Penyebaran Covid-19 di Kota Palembang

H. HARNOJOYO  
 Walikota Palembang

FITRIANTI AGUSTINDA  
 Wakil Walikota Palembang

Dr. RATU DEWA M.Si  
 Sekda Kota Palembang

Memakai Masker  
 Mencuci Tangan  
 Menjaga Jarak  
 Menjauhi Kerumunan  
 Membatasi moblisasi dan interaksi

**DIRGAHAYU INDONESIA 76<sup>TH</sup>**  
**INDONESIA TANGGUH  
 INDONESIA TUMBUH**

17 AGUSTUS 2021

Dr. H. DODI REZA ALEX, Lic.,Econ.,MBA  
 Bupati Musi Banyuasin

BENI HERNEDI, S.IP  
 Wakil Bupati Musi Banyuasin



# HNU Lepas Bantuan Beras PPKM

**MUARAENIM, MEDIASRIWIJAYA-** Peluncuran penyaluran bantuan beras Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sosial Tunai (BST) melalui Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2021, kepada Kabupaten Muara Enim, oleh Penjabat (Pj) Bupati Muara Enim, H.Nasrun Umar (HNU).

Turut mendampingi unsur Forkopimda, didampingi Pj.Sekretaris Daerah (Sekda), Drs.Eman Thabrani, seluruh Staf Ahli, Asisten, Kadin Sosial, Kadin Ketahanan Pangan, Kepala Kesbagpol, Kadin Kesehatan, Kepala BPBD, Kadin Kominfo, Camat Muara Enim dan perwakilan Transportir PT. DNR Palembang, acara dipusatkan di halaman Pemkab Muara Enim, Rabu (4/8).

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Muara Enim, Drs Bhakti, MSi dalam laporannya menyampaikan, pelaksanaan berdasarkan teleg Menteri Dalam Negeri (Mendagri) nomor 511.2/4014/SJ tanggal 23 Juli 2021 perihal Bantuan Beras PPKM bagi KPM PKH dan KPM BST melalui cadangan beras pemerintah yang bersumber dari APBN tahun 2021 dan surat PT DNR Palembang tanggal 30 Juli 2021 perihal Penyaluran Bantuan Beras PPKM.

Adapun maksud dan tujuan, dalam rangka melakukan upaya pencegahan wabah Covid-19, pemerintah memberikan bantuan beras 10 kg kepada KPM PKH dan KPM BST melalui Cadangan Beras Pemerintah (CBP), dengan tujuan untuk meringankan beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat PKH dan BST pada saat kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kabupaten Muara Enim.

Penyaluran beras PPKM dilaksanakan oleh Transportir PT.DNR Palembang pada tanggal 04 hingga 5 Agustus 2021 di beberapa titik lokasi, didampingi SDM PKH dan Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 tingkat Desa/Kelurahan, Babinsa dan Bhinkamtibmas, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

"Pada kesempatan ini pula kami laporkan kepada bapak Bupati Muara Enim, bahwa sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai saat ini telah dilaksanakan penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) di 10 Kantor Pos dalam wilayah Kabupaten Muara Enim dengan jumlah 6.828 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Per KPM mendapatkan bantuan sebesar @ Rp.300.000 / bulan selama dua bulan yaitu Bulan Mei dan Juni," sebutnya.

Sementara itu, dalam sambutannya HNU mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat melalui Kementerian So-



Penyaluran bantuan beras Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sosial Tunai (BST) melalui Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2021, kepada Kabupaten Muara Enim, oleh Penjabat (Pj) Bupati Muara Enim, H.Nasrun Umar (HNU).

sial Republik Indonesia yang telah menyalurkan 319,58 ton beras untuk 31.958 Kepala Keluarga (KK) atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM), warga Kabupaten Muara Enim yang terdampak Covid-19.

Secara simbolis bantuan beras ini diterima dari gudang Bulog Lahat yang di salurkan langsung ke desa-desa dengan jumlah 246 Desa dan 10 Kelurahan pada 22 Kecamatan

dalam kabupaten Muara Enim, dengan didampingi para petugas Program Keluarga Harapan (PKH), Taruna Siaga Bencana dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam lingkup pemerintah kabupaten Muara Enim

"Saya berharap semoga program ini dapat bermanfaat dan mampu meringankan beban masyarakat di tengah-tengah

pandemi Covid-19 yang melanda negeri yang kita cintai ini dan terutama khususnya bagi keluarga pra sejahtera, harap HNU.

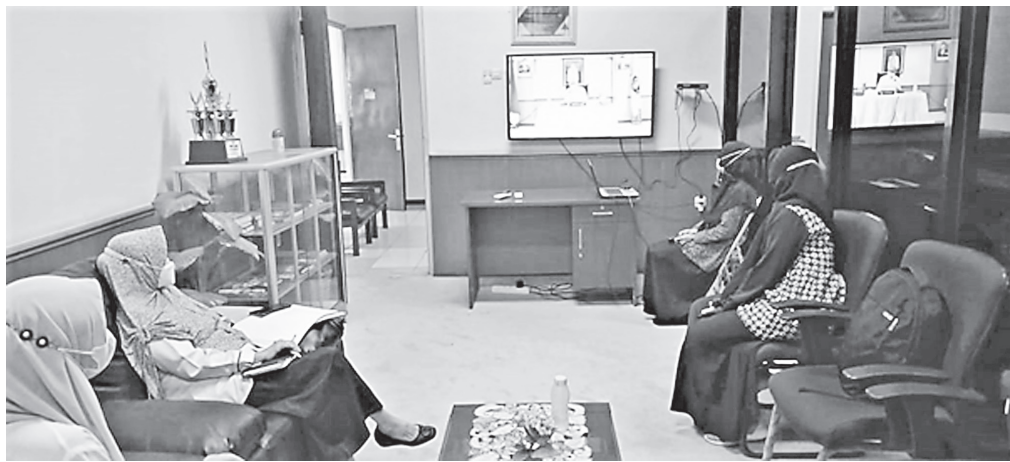
Pada kesempatan ini pula HNU menghimbau agar penyaluran bantuan ini dilaksanakan dengan tertib dan tepat sasaran serta pelaksanaannya tetap mematuhi protokol kesehatan Covid-19.

"Dengan iringan doa kita

bersama, semoga penyaluran berjalan dengan lancar dan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dan tentu pada akhirnya dapat meningkatkan khususnya bagi keluarga prasejahtera yang terdampak Covid-19," tambahnya.

"Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, penyaluran bantuan beras PPKM bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Program Keluarga

Harapan (PKH) dan Bantuan Sosial Tunai (BST) melalui Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Kabupaten Muara Enim, secara resmi saya nyatakan diluncurkan dan dimulai untuk disalurkan," ucap HNU menutup sambutannya, dan langsung melepas armada truck yang mengangkut penyaluran Bantuan Beras PPKM tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Muara Enim. (rel)



Asisten III Pemkab Muara Enim Ir. Maryana mengikuti webinar yang mengangkat tema "Best Practice Inovasi Daerah Pengukuran dan Penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021" di Ruang Asisten III Pemkab Muara Enim, Rabu (04/08) yang digelar Badan Litbang Daerah Kemendagri di Jakarta.

## Muara Enim Siap Raih Predikat Kabupaten Berprestasi

**MUARAENIM, MEDIASRIWIJAYA-** Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim diwakili Asisten III Pemkab Muara Enim Ir. Maryana mengikuti webinar yang mengangkat tema "Best Practice Inovasi Daerah Pengukuran dan Penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021" di Ruang Asisten III Pemkab Muara Enim, Rabu (04/08) yang digelar Badan Penelitian Pengembangan (Litbang) Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) di Jakarta.

Dikantor masing - masing perangkat daerah terkait Pemkab Muara Enim turut mengikuti webinar tersebut.

Pemkab Muara Enim siap

memperoleh hasil terbaik pada Innovative Government Award (IGA) tahun 2021 dengan capaian kabupaten berprestasi, inovatif dan terinovatif.

Pada kesempatan ini, Kepala Badan Litbang Daerah Kemendagri Dr. Drs. A. Fatoni, M.Si mengatakan bahwa sesuai amanat Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah dapat melakukan inovasi. Kemudian, kepala daerah wajib melaporkan inovasi daerah yang akan dilaksanakan kepada menteri, pemerintah pusat melakukan penilaian terhadap inovasi yang dilaks-

anakan oleh pemerintah daerah. Terakhir dalam pelaksanaan inovasi yang telah menjadi kebijakan pemerintah daerah dan inovasi tersebut tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan aparat sipil negara tidak dapat dipidana.

"Saat ini masih ada 32 daerah yang belum menginput inovasi. Karena banyak permintaan dari daerah untuk dimundurkan batas terakhir penerimaan inovasi dari semula 13 Agustus 2021. Maka Litbang memberikan kelonggaran waktu hingga 17 September 2021," ungkap Fatoni.

Adapun narasumber webinar ini menghadirkan Penjabat Bupati Nabire Dr. Anton Tony

Mote, yang mengatakan Kabupaten yang dipimpinnya melihat keberhasilan inovasi dilihat dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan masing - masing perangkat daerah.

Sementara Gubernur Jawa Tengah diwakili Kepala Biro Organisasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Ir. Iwhan Sudrajat, MM menuturkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjadikan inovasi bukan menjadi kebutuhan tapi sudah menjadi tradisi, terlebih pandemi saat ini Pemerintah dituntut melayani masyarakat tanpa bertemu langsung, dan agar sistem pemerintahan berjalan efektif. (rel)

## PT HBAP Diminta Perhatikan Kesejahteraan Masyarakat

**MUARAENIM, MEDIASRIWIJAYA-** Pj Bupati Muara Enim, H Nasrun Umar (HNU) mengunjungi PT Huadian Bukit Asam Power (HBAP) PLTU Mulut Tambang Sumsel 8 di Desa Tanjung Lalang, Kecamatan Tanjung Agung. Kedatangan mantan Sekda Sumsel ini disambut Direktur Umum PT HBAP Nicko Albart, Deputy General Manager Gusti Anggara, Direktur Planing Gu Quincheng, General Manager Zheng Guo Xiang, Senior Manager Jhony Samosir beserta jajaran Direksi lainnya.

Penjabat (Pj) Bupati H Nasrun Umar (HNU) meminta kepada perusahaan HBAP untuk dapat responsif memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat sekitar melalui Community Development (Pengembangan masyarakat) yang dikemas dalam program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan karena menurutnya perusahaan merupakan salah satu sektor penting yang dapat meningkatkan perekonomian di suatu daerah apalagi sekelas HBAP yang merupakan salah satu Proyek Strategi



Nasional (PSN).

Tak hanya itu, HNU yang datang bersama Dandim 0404 Muara Enim Letkol Inf Erwin Iswari serta Camat Tanjung Agung dan Camat Lawang Kidul, Rabu (04/08) juga mengatakan bahwa secara umum Pemkab Muara Enim akan tetap berkomitmen dalam memberikan rasa aman serta nyaman bagi siapapun Investor yang berinvestasi di Bumi Serasan Sekundang termasuk PT HBAP dan bukan hanya tetap berkomitmen saja tapi hal tersebut sudah menjadi salah satu prioritas penting bagi pemerintah daerah dalam menjamin keamanan dan kenyamanan itu.

"Tapi sebaliknya, jika sudah

berjalan aman dan nyaman yang tentu diiringi dengan keuntungan maka saya rasa sudah sepatutnya masyarakat Kabupaten Muara Enim minimal di sekitaran perusahaan juga dapat mencicipi sedikit dari keuntungan itu termasuk juga dapat bekerja di PT HBAP (tenaga kerja lokal dengan kapasitas dan skill yang dimiliki) dan saya yakin PT HBAP sudah memprioritaskan hal itu," kata HNU.

Diakhir tak lupa HNU memberikan apresiasinya kepada PT HBAP atas progress pengerjaan proyeknya yang sampai saat ini sudah mencapai 88% dan dirinya meyakini dapat selesai tepat pada waktunya. (rel)

## 316.554 Pelamar ...

"Adapun pelamar yang tidak memenuhi syarat untuk kualifikasi pendidikan non-SLTA sebanyak 11.304 orang, dan untuk kualifikasi pendidikan SLTA sebanyak 159.191 orang," ujar Sutrisno dalam keterangan tertulisnya, Selasa (3/8).

Ada sejumlah alasan mengapa seorang pelamar dapat dinyatakan TMS. Beberapa sebab diantaranya terkait dengan surat lamaran, akta kelahiran, e-KTP, surat pernyataan, dokumen akreditasi, ijazah, transkrip nilai, surat tanda registrasi (STR) tenaga kesehatan, pas foto, surat keterangan sehat, dokumen tidak asli, dan lainnya.

"Setelah dilakukan seleksi

administrasi dan verifikasi dokumen unggah CPNS, jika dokumen memenuhi syarat maka akan ditetapkan lulus seleksi administrasi dan selanjutnya bisa mencetak kartu ujian," ujar Sutrisno. "Namun jika dokumen TMS, maka bisa mengajukan keberatan atau sanggahan mulai 4 hingga 6 Agustus 2021," katanya.

Masa sanggah adalah kesempatan yang diberikan kepada pelamar untuk mengajukan keberatan terhadap hasil verifikasi yang disebabkan bukan karena kesalahan pelamar, namun adanya kesalahan dari verifikasi instansi. Sanggahan sendiri dimaksudkan bukan untuk

memperbaiki, mengubah, ataupun menambah informasi terhadap dokumen yang sudah di unggah.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Komjen Pol. Andap Budhi Revianto sudah mengingatkan kepada para calon pelamar, untuk membaca secara detail dan seksama terkait berbagai syarat dan ketentuan yang diperlukan di laman cpns.kemkumham.go.id. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari permasalahan dalam masa pendaftaran dan seleksi administrasi, bahkan untuk menghindari calon peserta gugur dalam proses seleksi administrasi.

■ sambungan dari halaman 1

## HD Bantu ...

Berkaitan dengan hal tersebut tentunya mobilitas dari para Dewan Pertimbangan Pendidikan akan semakin sibuk, untuk itu HD memberikan satu unit mobil operasional untuk dapat digunakan disetiap kegiatan yang berkaitan dengan pertimbangan dunia pendidikan di Sumsel.

Menanggapi kegelisahan

masyarakat terutama anak - anak yang masih bersekolah tentang keinginan mereka untuk dapat bersekolah tatap muka, HD meminta agar Dewan Pertimbangan Pendidikan dapat merumuskan permasalahan tersebut dan memberikan sebuah inovasi agar keinginan mereka untuk dapat bersekolah tatap muka dapat segera terwujud.

"Sekarang kita memiliki problem yang tidak sederhana, saat ini khususnya ditingkat sekolah menengah kebawah. Dimana tidak lazimnya KBM dilakukan secara daring disaat ini. Tentunya hal ini perlu kita berikan inovasi agar KBM dapat dilakukan secara tatap muka yang sifatnya tidak melanggar protokol kesehatan,"

ujar HD. "Apalagi mereka anak - anak sudah merindukan momen interaksi di sekolah yang tentunya tidak didapat jika dilakukan secara daring," kata HD. Turut hadir Kadiknas Drs. H. Riza Fahlevi, MM, Kadis Kominfo H. Achmad Rizwan, S. STP, MM, Karo Umum dan Perlengkapan, Sandi Fahlepi, SP, MSi. (rel)

## Ditreskrimum ...

"Langkah kita untuk mengetahui ada tidaknya dana itu (uang 2 triliun), Polri mengirim surat ke Bank Indonesia sesuai aturan, untuk izin membuka rekening itu atas persetujuan BI, Pak Dirkrim sudah membuat suratnya hari ini ditujukan ke BI untuk minta persetujuan membuka rekening tersebut," ungkap Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Supriadi, diruang kerjanya, Rabu (4/8). Dijelaskan Kabid Humas

Polda Sumsel, nanti setelah disetujui Bank Indonesia, barulah diketahui ada tidaknya uang 2 triliun tersebut pada rekening Haryanti. "Setelah dibuka barulah nanti diketahui ada berapa uangnya, setelah di periksa oleh Bank Mandiri atas persetujuan Bank Indonesia," jelasnya. Bukan hanya membuat surat permohonan ke Bank Indonesia, pihak Polri dalam hal ini Ditreskrimum Polda Sumsel juga membuat surat ke PPATK.

"Kita juga membuat surat ke PPATK untuk mengetahui aliran dananya, meningsi siapa pemilik rekening tersebut, Dirkrim membuat surat untuk mengetahui uang dalam rekening tersebut," ujarnya.

Beritakan sebelumnya, Polda Sumsel bersama Bank Mandiri mengklarifikasi kalau Saldo yang dimiliki anak bungsu, pihak Polri dalam hal ini Ditreskrimum Polda Sumsel juga membuat surat ke PPATK.

## Studi Banding ...

Kegiatan studi banding itu merupakan salah satu program kerja dari Kementerian Luar Negeri Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Katolik Misi Charitas Palembang. Dalam kegiatan studi banding ini BEM UKMC mengajak Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Katolik Soegijapranata (SCU) untuk bergabung melalui virtual zoom meeting.

Studi banding ini mengusung tema "BEM UKMC-Merekat, Mendekat dan Melebur Lebih Dekat". Tema ini memiliki arti dan berharap dengan diadakannya kegiatan studi banding dengan BEM SCU dapat tercipta hubungan yang lebih erat lagi antara kedua belah pihak,

serta kegiatan ini juga dapat menjadi wadah untuk bertukar pikiran dan mengetahui lebih dalam diantara kedua organisasi. Kegiatan ini dimulai dengan perkenalan dari masing-masing organisasi yang bertujuan untuk saling mengenal. Lalu yang kedua forum diskusi di mana kedua organisasi akan saling mengajukan pertanyaan, pendapat, atau saran.

Pada sesi forum diskusi ini, baik BEM UKMC maupun BEM SCU antusias bertanya dan memberikan tanggapan. Dan yang ketiga ramah tamah, pada sesi ini siapapun yang ingin menyampaikan kesan dan pesannya dipersilahkan, bahkan BEM SCU secara terbuka mengajak BEM

UKMC untuk ikut bergabung dengan program kerja mereka. Kegiatan Studi banding Virtual ini juga diikuti dan didampingi oleh Wakil Rektor III UKMC Rm Gunadi Emmanuel, ST., M.Eng dan Ria Triyomi, S.Pd., M.Pd. Harapam melalui kegiatan ini dapat tercipta hubungan yang lebih erat lagi antara kedua belah pihak, serta kegiatan ini juga dapat menjadi wadah untuk bertukar pikiran dan mengetahui lebih dalam diantara kedua organisasi.

"Semoga kegiatan studi banding ini dapat terus diadakan agar BEM UKMC dapat mengenal dan melebur dengan organisasi mahasiswa di Universitas lain," ujar Ria. (daris)

■ sambungan dari halaman 1

■ sambungan dari halaman 1